

Ringkasan

21 Mei 1998, Suharto, presiden Indonesia waktu itu, dipaksa turun dari jabatan yang telah dikuasainya selama lebih dari 30 tahun. Sejak saat itu Indonesia mengawali langkah menuju demokrasi, demikian halnya dengan kebebasan perspun dimulai, yang pada waktu sebelumnya bisa dikatakan tidak ada. Undang-Undang Pokok Pers mulai diperbaharui dan pada bulan September 1999 Undang-Undang baru nomor 40 tentang Pers telah menjadi kenyataan.

Dalam tesis ini dipaparkan undang-undang no 40 tentang pers tersebut serta penerapan Undang-Undang itu. Dimanakah kendala dari penerapan undang-undang tersebut? Bagaimanakah wartawan mensikapinya? dengan kata lain. Apa yang menghambat mereka untuk Merdeka serta Mandiri dalam pemberitaan? Itulah sebagian pertanyaan yang ada.

Analisis undang-undang pers dilakukan berdasarkan sudut pandang Ilmu Politik. digunakannya Teori tentang demokrasi, masyarakat sipil, serta aturan-aturan media dalam demokrasi. pasal 19 piagam PBB yang menjamin kebebasan berekspresi, merupakan dasar analisis isi dari undang-undang, yang ditulis pada halaman satu dari dua bab utama. Bab utama yang lainnya tentang penerapan Undang-Undang pers tersebut.

Bagian utama dari tesis ini dipelajari di Jakarta, Indonesia dari bulan Agustus hingga Oktober 2001. Waktu itu 19 orang yang bekerja untuk media seperti wartawan, Redaktur dan yang lainnya diwawancarai mengenai Undang-Undang pers yang Baru serta seberapa besar Undang-Undang tersebut berpengaruh bagi pekerjaan mereka.

Hasilnya menunjukkan pada umumnya wartawan tahu tentang Undang-Undang Pers, yang mana undang-undang tersebut menjamin kebebasan pers seperti yang ditunjukkan pada Deklarasi hak asasi manusia oleh PBB no 19. Dan diterapkannya Undang-Undang tersebut dalam praktek. Tentu saja ini merupakan Sumbangan besar dari kebebasan pers di Indonesia. Contohnya Pemerintah tidak lagi bisa turut campur dalam kerja media, seperti dengan membredel media, dan wartawan di lindungi Undang-undang

dan tidak dapat di paksa untuk mengungkap sumber beritanya. Tetapi masih ada beberapa persoalan bagi pers Indonesia. Kekerasan terhadap wartawan adalah salah satu diantaranya. Kekerasan tersebut berasal dari skelompok massa yang tidak bisa menerima apa yang di tulis media. Tetapi Kurangnya serta Perlunya Pendidikan bagi wartawan itu sendiri.

Semua diatas tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa Pers mengalami kemajuan yang pesat daripada institusi penting lainnya dalam masyarakat. Kuranya kerja dari institusi masih menjadi persoalan besar. Contohnya Sistem hukum dan Peradilan masih sangat lemah. Bagaimanapun juga tidsk bisa dipungkiri bahwa kebebasan pers serta penerapan Undang Undang pers yang baru merupakan langkah maju dalam proses Demikratisasi di Indonesia.